

GLOBALISASI DAN KEMISKINAN*

*Tajjuddin Noer Effendi***

Abstract

Globalization, namely integration of the world economy into a single market, has been unprecedentedly affecting every part of the world as technological development has allowed handful bussines effectively control local resourcess. Prosperity and advantages brought about by globalization, however, is not equally shared, as investment, growth and modern technologies are concentrated mainly in the developed countries. Moreover, developing countries including Indonesia are not only deprived but also excluded from it. Analysis of recent history in Indonesia presented in this article shows that integration into global market even created a deindustrialization process to take place. The level of unemployment and proverty is getting worse as Indonesia increasingly more integrated into the world economy.

Kata-kata kunci: *globalisasi; liberalisasi ekonomi; kemiskinan; pengangguran.*

Pengantar

Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia (Khor, 2000).

* Tulisan merupakan pengembangan dari paper yang telah dipresentasikan pada *International NGO Forum on Indonesian Development* dilaksanakan di Yogyakarta, 18-20 Juni 2001.

** *Dr Tajjuddin Noer Effendi* adalah staf pengajar Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Dalam laporan *World Development Report* (World Bank, 1995:3) dijelaskan bahwa integrasi ekonomi dunia dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Diyakini integrasi dunia diperkirakan menimbulkan efek ganda (*multiplier effects*) dan diharapkan dapat merangsang perluasan peluang kerja dan peningkatan upah riil sehingga kemiskinan berkurang. Bagi negara maju dengan ketersediaan dukungan berbagai keunggulan (sumberdaya manusia dan teknologi) barangkali harapan-harapan itu dapat menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan negara berkembang dengan berbagai macam kondisi keterbelakangan merasa khawatir bahwa integrasi dunia hanya menguntungkan pemilik modal (negara-negara maju) dan akan menimbulkan malapetaka bagi negara-negara berkembang. Masyarakat miskin yang merupakan mayoritas penduduk negara berkembang mungkin tidak dapat menikmati peluang-peluang yang tercipta dan bahkan terpaksa tersisih dan terpuruk terjerembab ke dalam lembah kemiskinan.

Berangkat dari pemikiran itu, tulisan ini berusaha membahas implikasi globalisasi pada beberapa aspek kehidupan, terutama kemiskinan. Atas dasar itu kemudian diusahakan untuk menelaah apakah globalisasi dapat membuka peluang atau justru menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bahasan dimulai dengan mendiskusikan aspek-aspek yang terkait dengan globalisasi. Berikutnya dibahas implikasi globalisasi abad 19 dan 21 di Indonesia yang dipusatkan pada implikasi pada ekonomi, sosial dan politik. Pada bagian akhir dibahas kemungkinan implikasi bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Globalisasi

Globalisasi, apakah ia hasil rekaan, kesepakatan atau paksaan dan apa pun latar belakang kemunculannya, telah menjadi istilah populer dan menjadi sorotan dari berbagai pihak. Ada secercah harapan terselip padanya karena menjanjikan peluang-peluang perbaikan kehidupan. Ada kala memunculkan ketakutan dan menghantui pemikiran karena khawatir akibat yang akan ditimbulkannya. Realitas menunjukkan bahwa istilah itu dengan berbagai macam penafsiran telah menjadi isu dan pembicaraan

masyarakat luas. Terlepas dari segala macam penafsiran, globalisasi ditengarai sebagai sebuah proses yang kompleks (Giddens, 2000: 38). Kekompleksan itu muncul karena ia digerakkan oleh berbagai kekuatan, baik budaya, teknologi, politis maupun ekonomi. Tidak mengherankan bila kemudian ia dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Ia tidak hanya mengubah kehidupan sehari-hari tetapi juga menciptakan kekuatan-kekuatan internasional baru. Bahkan disadari atau tidak, globalisasi telah mentransformasikan ruang dan waktu serta institusi-institusi, baik sosial, budaya maupun ekonomi.

Globalisasi adalah terminologi baru tetapi eksistensinya telah ada sejak lama. Gejala globalisasi telah muncul pada abad 19 sebagai rekaan demokrasi sosial gaya lama (Giddens, 2000: 32-33). Gejala itu muncul sejak petualang dan pedagang Eropah mejelajahi dunia. Masa era merkantilis pertengahan abad 19 dengan dukungan transportasi laut boleh dikatakan sebagai awal globalisasi abad 19. Saat itu perdagangan dan perekonomian dunia sudah terbuka dan dikuasai pedagang Eropa (negara maju). Jalur perdagangan internasional dan pasar dunia dikuasai dan dimonopoli pedagang Eropa. Monopoli tidak hanya melalui diplomasi tetapi diusahakan melalui kekerasan (peperangan) dalam upaya menundukan dan dorongan hasrat untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Asia, Afrika, Amerika Latin kemudian daerah-daerah itu dijadikan jajahan demi kepentingan perdagangan (sumber bahan mentah dan pasar). Ketika itu muncul koloni-koloni yang sudah dikuasai sehingga dengan mudah untuk dikontrol aktivitas perdagangannya. Dengan demikian keuntungan para pedagang (Eropa) dapat dilipatgandakan dan negara dengan mudah bisa mengambil keuntungan untuk membiaya pembangunan di negara asal.

Apa beda antara globalisasi abad 19 dengan abad 21 ini? Perbedaan terletak pada cara dan pendekatan yang dipakai dalam penguasaan dan dalam hal kecepatan serta cakupan. Di abad 21 penguasaan pasar dan perdagangan tidak lagi dengan menguasai secara fisik, seperti abad 19, tetapi melalui pendekatan dengan menggunakan instrumen politik, budaya dan teknologi. Negara-negara maju dan para pemilik modal berskala internasional tidak perlu bersusah payah dan berlama-lama di perjalanan untuk melakukan transaksi perdagangan. Melalui kerjasama kelompok dalam pasaran bersama, ekspansi pasar dapat dilakukan. Kerjasama pemasaran

diorganisir dan berdasarkan kesepakatan politis dibentuk forum di sebut AFTA, NAFTA, APEC, WTO dsbnya. Melalui forum itu dilakukan perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam mewujudkan ekspansi dan penguasaan pasar. Negara yang mempunyai kekuatan lobi politis cenderung akan lebih dapat mengambil keuntungan dan diuntungkan ketimbang negara yang lobi politis lemah. Secara politis negara-negara maju yang mempunyai lobi politis lebih kuat akan banyak menguasai dan diuntungkan dengan liberalisasi ekonomi dalam era globalisasi abad ini.

Penguasaan pasar bisa juga dilakukan lewat media teknologi. Dengan menggunakan teknologi komunikasi mutakhir, negara-negara maju dengan mudah melakukan transaksi perdagangan menembus batas-batas negara dalam waktu sangat cepat dan singkat. Integrasi ekonomi menuju pada perekonomian sepenuhnya global melampaui dan tanpa ada batas-batas negara. Teknologi mempercepat proses integrasi dan dengan sekejap mata dapat mempengaruhi masyarakat dunia di mana pun berada. Informasi dengan mudah menyebar keseluruh dunia tanpa ada yang bisa melakukan kontrol. Siapa saja yang mempunyai akses dan menguasai teknologi komunikasi mutakhir, di mana pun dia berada dengan mudah dan leluasa berinteraksi dengan dunia. Transaksi apa pun dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Dunia semakin terbuka dengan segala macam implikasinya. Implikasi tidak saja ekonomi dan politik tetapi juga pada hidup keseharian, seperti gaya hidup, pola makan dan seterusnya.

Beberapa Implikasi

Implikasi globalisasi tidak sama untuk tiap negara dan masyarakat meskipun ada kecenderungan memiliki kemiripan. Letak geografis dan daya resistensi suatu negara dan masyarakat agaknya dapat mempengaruhi implikasi globalisasi. Karenanya, derajat keterpengaruhannya globalisasi antar negara dan masyarakat juga bisa berbeda. Tidak cukup ruang untuk mendiskusikan berbagai macam implikasi di berbagai negara dan masyarakat. Sesuai dengan fokus pembahasan maka implikasi hanya dipusatkan pada pengalaman dan realitas yang terjadi di Indonesia. Simplifikasi dan reduksi mungkin

saja terjadi sehingga tidak dapat memberikan gambaran utuh menyeluruh.

Implikasi Globalisasi Abad 19

Pertama mari kita cermati implikasi globalisasi abad 19 pada kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah petualang dan pedagang dari Eropa, seperti Spanyol, Portugis, Inggris melakukan kontak dagang dengan masyarakat Indonesia kemudian disusul dengan pedagang Belanda. Pada tahap berikutnya Belanda menggunakan armada untuk menaklukkan dan menduduki sebagai upaya memonopoli perdagangan. Upaya monopoli diwujudkan melalui maskapai perdagangan Belanda (VOC), tidak sama tetapi sepak terjang ada kemiripan dengan multi corporation atau perusahaan trans nasional, yakni memonopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dengan kekerasan tidak hanya menyingkirkan dan memarjinalkan masyarakat Indonesia tetapi juga telah mematikan berbagai macam benih aktivitas ekonomi yang sangat penting dan sekaligus mematikan bibit kewiraswastaan (Furnival, 1944: 45). Demikian juga, Masvelt (1979: 79) menyimpulkan bahwa perdagangan yang dimonopoli oleh pedagang yang disponsori oleh maskapai perdagangan Belanda telah menghancurkan industri pribumi (deindustrialisasi). Perdagangan bebas yang diterapkan oleh Belanda menyebabkan Indonesia banjir barang-barang produk Eropa. Pada saat itu Indonesia hanya berfungsi sebagai penghasil bahan mentah dan juga sebagai pasar untuk mendukung berbagai kegiatan industri di Eropa.

Untuk mendukung kepentingan perdagangan dan menggerakkan industri di Eropa, kolonial Belanda mengundang dan mengizinkan pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha Eropa untuk menanamkan modal mereka di Indonesia. Ini dilakukan melalui kebijakan pertanahan (*agrarian law*) dengan menerapkan sistem sewa jangka panjang dan hak penguasaan yang cukup ringan dan menguntungkan pengusaha yang mau menanamkan modalnya. Kebijakan itu telah menarik perhatian modal asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Modal asing secara besar-besaran masuk ke Indonesia di penghujung abad 19 diawali dengan penanam modal pengusaha Inggris di perkebunan teh (Hall, 1988: 733-735). Kemudian

pengusaha Eropa dari Swiss, Belgia dan Jerman berdatangan dan menanamkan modalnya di Indonesia dalam kegiatan minyak, timah dan perkebunan. Modal Belanda sekitar 75 persen, Inggris 13,5 persen dan Amerika 2,5 persen. Bersamaan dengan itu pekerja asing juga masuk ke Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 16.476 pekerja (tidak termasuk Cina, India dan Belanda) yang bekerja di perusahaan asing di berbagai daerah di Indonesia.

Tanah-tanah disewa oleh perusahaan asing untuk diusahakan sebagai lahan perkebunan tebu, kelapa sawit, coklat, karet, indigo dan lain-lain. Tanaman yang diusahakan adalah tanaman untuk keperluan bahan mentah dalam upaya mendukung kegiatan industri di Eropa. Bahkan kolonial Belanda menerapkan program tanam paksa. Penduduk pribumi diharuskan menanam tanaman sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial Belanda, misalnya tanaman tebu. Hasil tanam paksa harus diserahkan pada pabrik-pabrik tebu milik pengusaha kolonial Belanda dengan harga yang telah ditetapkan oleh kolonial Belanda. Menurut Hall (1988: 732) ketika itu seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia dikuasai oleh kolonial Belanda dan pengusaha asing sedang kegiatan ekonomi pribumi dibatasi dan dipinggirkan dengan menggunakan beberapa peraturan yang membatasi wilayah arena perdagangan. Misalnya perdagangan antar pulau hanya dibolehkan bagi pedagang Eropa. Pedagang perantara pengumpul hanya diizinkan bagi pengusaha keturunan Cina. Bahkan buruh di perusahaan timah dan minyak hanya memperkerjakan pekerja dari Cina. Pribumi hanya menjadi kuli kontrak atau buruh kasar dan hanya diizinkan berdagang atau membuka industri kecil di pedesaan. Kontrol terhadap harga dan pembatasan wilayah perdagangan disertai monopoli pasar menyebabkan masyarakat lokal tidak memiliki ruang gerak dan keterbatasan peluang untuk terlibat pada aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Gambaran itu memberikan pemahaman bahwa proses liberalisasi ekonomi yang dimulai tahun 1870 itu tidak hanya meminggirkan dan menyingkirkan penduduk pribumi dari tanah dan aktivitas ekonomi tetapi membatasi pasar dengan diikuti membanjirnya produk luar negeri, terutama yang berasal dari Eropa (Booth, 1998: 372). Ketidakmampuan bersaing menyebabkan industri lokal pribumi tidak berkembang ibarat pepatah, mereka layu atau mati sebelum

berkembang. Dalam posisi seperti itu masyarakat lokal (pribumi) hanya dapat bekerja sebagai petani subsisten atau pekerja di perkebunan sebagai buruh atau kuli dengan upah sangat rendah yang tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Furnival (1944: 44) menggambarkan bahwa saat itu kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat mengerdil alias hidup serba kekurangan dalam himpitan kemiskinan.

Di tengah liberalisasi ekonomi pada tahun 1930 terjadi krisis ekonomi. Banyak pengusaha Eropa mengalami kesulitan bisnis dan bangkrut. Akibatnya, permintaan bahan mentah dari Indonesia menurun tajam. Pengusaha perkebunan di Indonesia terpukul dan mengalami goncangan. Sebagian gulung tikar dan sebagian bertahan tetapi terjadi pengurangan pekerja dan buruh. Ekonomi yang selama itu bertumpu pada kekuatan pasar Eropa mengalami stagnasi. Secara langsung ekonomi pribumi tidak mengalami pukulan yang cukup berarti tetapi berpengaruh pada kehidupan masyarakat karena ribuan pekerja terpaksa kehilangan pekerjaan. Krisis ekonomi ini telah memporakporandakan sistem ekonomi modern (kapitalis) sedang ekonomi pribumi yang sebagian besar masih subsisten mampu bertahan dengan segala macam kekurangannya. Namun, menurut catatan sejarah, penduduk di beberapa daerah yang terisolir mengalami bencana kelaparan karena untuk membantu pemulihan ekonomi pemerintah Belanda di Eropa anggaran pemerintah kolonial untuk membeli persediaan bahan pangan berkurang. Keuntungan ekonomi yang didapatkan para pengusaha asing tidak dirasakan rakyat pribumi karena digunakan untuk pembangunan di negeri asal (di Eropa) tetapi ketika mengalami kesulitan (krisis ekonomi) rakyat pribumi ikut merasakan akibatnya. Ketidakadilan inilah yang menyebabkan rakyat pribumi tidak dapat ke luar dan tetap berkubang dalam lembah kemiskinan.

Implikasi Globalisasi Abad 21

Apa implikasi globalisasi abad 21 ini? Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar legitimasi kekuasaan rezim berkuasa tidak goyah maka penanaman modal asing dipermudah melalui bantuan berbagai kebijakan. Persyaratan untuk menanamkan modal dibuat lebih ringan dan lunak. Modal asing mengalir terus. Kegiatan industri

meningkat tajam. Kerjasama (*joint*) pengusaha pribumi dengan pengusaha asing semakin banyak dilakukan. Kerjasama perusahaan modal asing dengan perusahaan pribumi tidak hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam industri otomotif (Chalmers, 1996: 327-345). Apakah kerjasama itu saling menguntungkan? Cukup sulit diketahui secara pasti. Yang jelas beberapa perusahaan milik non-pribumi yang bekerjasama dengan penguasa asing menjadi perusahaan raksasa (konglomerasi). Secara makro dapat dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dan ini banyak menjadi kekaguman berbagai negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Ada yang menyebutnya sebagai "keajaiban Asia" (*The Asian miracle*).

Sejalan dengan itu perusahaan-perusahaan pribumi yang tidak mampu bersaing dengan modal asing cukup banyak. Akibatnya, banyak perusahaan kecil milik pribumi bangkrut dan gulung tikar. Angka yang bangkrut mencapai sekitar 30 persen tahun 1980-87 dan 33 persen tahun 1988-93 (lihat Tabel 1).

TABEL 1
Tingkat Ukuran Usaha yang Bangkrut Tahun 1980-1993
(PER SEN)

Tingkat Ukuran Usaha	Bangkrut	
	1980-87	1988-93
Sangat kecil	30	31
Kecil	25	30
Menengah	22	23
Besar	12	15
Sangat besar	20	23

Sumber: Mundrajad Kuncoro dan Anggito Abimayu, (1995). 'Struktur dan Kinerja Industri dalam Era Deregulasi dan Globalisasi.' *Kelola*, Vol 10 No 4, hal. 52.

Menurut Dawam Raharjo (1986: 177), sejak modal asing masuk ke Indonesia banyak industri tradisional, terutama tekstil gulung tikar sebab tidak mampu bersaing dengan industri modern milik modal asing. Diperkirakan pada tahun 1969-1970 jumlah industri tekstil tradisional

sekitar 324.000 perusahaan. Pada tahun 1976-1977 hanya tersisa sekitar 60.000 perusahaan. Berarti sekitar 60 persen tidak mampu beroperasi lagi.

Kehancuran industri kecil tidak hanya melanda industri tekstil, tetapi juga industri minuman tradisional. Banyak industri minuman tradisional bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan industri minuman modern, seperti *Coca Cola*, *Seven Up*, *Greensand* dan sebagainya. Demikian juga, industri kecil pedesaan yang memproduksi alat rumah tangga memanfaatkan bahan baku tanah dan bambu banyak gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk industri modern plastik. Beberapa ada yang mampu bertahan dengan melakukan diversifikasi dan meningkatkan kualitas produk, seperti yang terjadi di Kasongan, Bantul Yogyakarta. Meskipun mampu bertahan. Mereka umumnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Kehancuran industri tradisional ini juga ada kaitan dengan perubahan gaya hidup masyarakat menuju pada gaya hidup modern yang tergoda oleh bujuk rayu promosi dan iklan di media yang begitu gencar di masa globalisasi ini. Mereka yang daya belinya cukup cenderung meniru gaya hidup yang sering dipromosikan di media (TV) atau iklan lewat internet. Ekspansi restoran gaya *Kentucky Fried Chicken*, *McDonald* dan yang sejenisnya bermunculan bagaikan jamur di musim hujan. Kota kecil kabupaten juga tidak luput dari ekspansi restoran itu. Globalisasi memungkinkan masyarakat kelas menengah menikmati dan meniru gaya hidup yang dapat mereka lihat dari media masa dan iklan. Berbagai macam produk baru ditawarkan dan masyarakat setiap saat dibujuk dengan berbagai macam hadiah yang cukup menarik dan menggoda. Produk-produk itu pada umumnya adalah produk industri negara maju atau modal asing yang dirancang dan disesuaikan dengan kondisi pasar (masyarakat) setempat. Komoditas apapun telah masuk ke dalam kehidupan keseharian masyarakat yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Kemajuan dalam teknologi dan cara promosi telah memungkinkan ekspansi pasar yang kelihatannya sulit untuk dielakkan.

Ekspansi pasar dan mengalirnya modal asing diikuti dengan masuknya pekerja asing ke Indonesia. Pada periode tahun 1990-1996 jumlah pekerja asing tenaga terampil meningkat dari sekitar 18.335

menjadi sekitar 64.760 pekerja (periksa Tabel 2). Tentunya ini berimplikasi pada menyempitnya peluang kerja bagi pekerja Indonesia. Di samping itu, para pekerja asing ini umumnya dibayar dengan standard gaji masing-masing negara. Gaji pekerja asing dengan pekerja Indonesia berbeda cukup jauh bisa 10 atau 15 kali lebih besar gaji pekerja asing. Implikasi yang dirasakan adalah devisa dari sektor jasa mengalami defisit. Memang defisit itu tidak semua ada kaitan dengan pekerja asing. Diperkirakan defisit negara di sektor jasa pekerja asing dan jasa profesional sekitar 5 milyar dolar Amerika Serikat.

TABEL 2
Jumlah Pekerja Asing Menurut Jabatan di Indonesia
Tahun 1990 dan 1996

Jabatan	1990		1996	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	3245	17,7	18463	28,5
Profesional	4820	26,2	15899	24,5
Foreman	2993	16,3	9266	14,4
Operator/teknisi	7277	39,7	1132	32,6
Total	18335	100	64760	100

Sumber: Depnaker, 1996, Laporan Ditjen Binapenta

Memang era globalisasi ini telah membuka peluang pekerja Indonesia bekerja di luar negeri. Pada awalnya pekerja Indonesia hanya bekerja di Timur Tengah, tetapi kemudian mereka bekerja di berbagai negara. Menurut catatan Departemen Tenaga kerja, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tercatat 964.111 pekerja terdiri dari perempuan 628.972 dan laki-laki 335.139 pekerja. Sumbangan mereka pada devisa negara pasti ada tetapi data akurat jumlah devisa dari pekerja migran ini sulit didapatkan. Namun remitan yang dikirimkan ke kampung halaman mereka dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan ekonomi keluarga. Meskipun masih sangat terbatas, para pekerja migran dapat memberikan sumbangan bagi penanggulangan kemiskinan untuk masing-masing keluarga. Akan tetapi ketika krisis ekonomi melanda beberapa negara, para pekerja migran banyak yang

kembali ke kampung halaman. Hal ini menambah beban pengangguran yang selama ini sudah cukup mengkhawatirkan.

Implikasi pada Kemiskinan

Perubahan paling penting dengan arus globalisasi adalah diperluasnya peran pasar keuangan dunia. Lebih dari trilyunan dolar per hari dijual dalam transaksi jual beli mata uang (Giddens, 2000: 34). Pialang-pialang mata uang kaliber dunia dengan leluasa dan dalam tempo yang singkat dapat menjual dan membeli mata uang satu negara. Transaksi mata uang yang demikian cepat telah membawa implikasi bagi sistem moneter suatu negara. Melelui jual beli mata uang di pasar keuangan dunia, mata uang suatu negara bisa menjadi tidak stabil dan menyebabkan negara itu mengalami guncangan sistem moneter. Sistem moneter Asia Tenggara mengalami krisis setelah terjadi permainan transaksi mata uang di pasar internasional. Mula-mula mata uang Thailand terdepresiasi kemudian mata uang Indonesia yang berakibat pada munculnya krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis politik dan kemudian krisis multidimensi.

Krisis moneter yang diawali pertengahan 1997 menyebabkan sendi-sendi perekonomian mengalami krisis dan kemudian menerpa hampir ke seluruh sektor. Sektor tergolong modern (industri, konstruksi, dan keuangan) mengalami pukulan paling berat. Sektor listrik, gas, dan air bersih serta sektor pertanian masih dapat bertahan. Mencermati data statistik pada tahun 1997 hampir semua sektor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 1996 (lihat Tabel 3). Pada tahun 1998 semua sektor mengalami penurunan. Bahkan beberapa sektor mengalami penurunan sampai titik negatif, kecuali sektor pertanian, listrik, gas, dan air bersih. Listrik, gas dan air dapat bertahan karena dari tahun 1996 sampai tahun 1998 konsumsi listrik meningkat dari 56,932 GWh menjadi 65,261 GWh. Sektor pertanian dapat bertahan tidak sampai titik negatif mungkin karena beberapa hasil pertanian di beberapa daerah mengalami kenaikan penghasilan secara tajam ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah. Harga produk perkebunan (kelapa sawit, coklat, cengkeh, kopi, lada dan lain-lain) dan perikanan (udang) yang sebagian besar diekspor dengan patokan harga dolar merasakan kenaikan penghasilan. Selama

krisis berlangsung daerah-daerah penghasil perkebunan dan perikanan kurang begitu merasakan terpaan krisis. Nilai tukar yang tidak stabil menyebabkan penghasilan masyarakat juga turut turun naik tidak menentu tergantung pada pasar.

TABEL 3
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Konstan 1993
Menurut Sektor Tahun 1996, 1997, Dan 1998

Sektor	1996	1997	1998
Pertanian, kehutanan, perikanan	3.14	0.72	0.38
Pertambangan dan penggalian	6.74	1.71	-3.35
Industri pengolahan	11.59	6.42	-15.59
Listrik, gas, dan air bersih	13.63	12.75	1.42
Bangunan	12.76	6.43	-37.49
Perdagangan, hotel, restoran	8.16	5.80	-20.64
Pengangkutan dan komunikasi	8.68	8.31	-11.84
Keuangan, asuransi, jasa perusahaan	6.04	6.45	-18.24
Jasa masyarakat	3.40	2.54	-5.51
PDB	7.82	4.91	-13.72
PDB Tanpa Migas	8.16	5.45	-14.82

Sumber: Biro Pusat Statistik (dikutip dalam Boediono, Ace Suryadi, dan Rusman Heriawan (1999)).

Tidak diduga sektor-sektor tergolong modern yang selama 32 tahun Orde Baru berkuasa mendapat kemudahan agar menjadi andalan dalam memicu pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam dan terpuruk hancur sampai pada titik negatif (minus). Bahkan banyak pengusaha meninggalkan utang, baik luar maupun dalam negeri. Bank-bank yang dengan mudah mendapat kucuran dana dari pemerintah melalui BLBI satu per satu mengalami kesulitan likuiditas dan meninggalkan utang dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian, para pekerja banyak yang diberhentikan dan dirumahkan.

Selain itu, industri-industri yang amat bergantung pada bahan baku impor tidak mampu beroperasi lagi, karena harga bahan baku eks impor naik tajam akibat nilai rupiah melemah. Bersamaan dengan itu ribuan usaha perdagangan menengah di beberapa kota bangkrut. Krisis politik terjadi karena kepercayaan masyarakat pada pemerintah merosot tajam. Gelombang unjuk rasa dan kerusuhan sosial terjadi di mana-mana. Kerusuhan sosial, amuk massa, menghancurkan dan membakar pusat kegiatan ekonomi terjadi. Beberapa yang sangat mencekam adalah Kasus Mei di Jakarta dan kasus di Solo. Banyak pedagang mengalami kebangkrutan dan banyak yang tidak dapat bangkit lagi karena dihancurkan dan dibakar massa ketika terjadi kerusuhan. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan terkena PHK ataupun terpaksa tidak dapat berusaha dan bekerja karena tempat usaha hancur diamuk massa. Kondisi ketenagakerjaan menuju pada titik yang cukup mengkhawatirkan. Jutaan angkatan kerja baru tidak dapat memasuki pasar kerja diikuti dengan tingginya angka pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan meluasnya kemiskinan.

Krisis ekonomi dan sosial telah menghambat proses perubahan struktur ketenagakerjaan. Sebelum krisis terjadi aliran pekerja yang keluar dari sektor pertanian menuju sektor non-pertanian (industri pengolahan, konstruksi, dan jasa) mulai meningkat. Namun, selama krisis berlangsung banyak pekerja kembali lagi ke sektor pertanian. Kecenderungan ini dapat diamati dari data pekerjaan menurut lapangan pekerjaan pada tahun 1996 dan 1998 (lihat Tabel 4). Pada tahun 1996 pekerja di sektor pertanian sekitar 45,4% dan pada tahun 1998 naik menjadi sekitar 49%. Sebaliknya pekerja yang bekerja di sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa pada tahun 1998 mengalami penurunan. Mengindikasikan banyak pekerja di sektor itu keluar atau meninggalkan pekerjaan itu. Ada dua implikasi akibat pergeseran itu. *Pertama*, angka pengangguran terbuka meningkat karena banyak pekerja di sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa terpaksa ke luar dan berusaha mencari kerja di sektor lain. *Kedua*, angka setengah pengangguran meningkat karena sebagian dari mereka masuk ke sektor pertanian dan sektor informal yang sebagian besar dikelola oleh keluarga. Mereka kerja dengan jam kerja tidak menentu serta sering tidak dibayar dan bila diupah biasanya upah rendah.

TABEL 4

Pekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 1997 dan 1998

Lapangan Usaha	1997 (%)	1998 (%)
Pertanian	45.4	49.5
Industri	11.3	11.3
Konstruksi	5,5	2.5
Perdagangan	17.7	7.3
Jasa angkutan	20.1	19.4
Total %	100	100
N (Juta)	82,5	87,0

Sumber: Susenas 1997 dan 1998

Sebelum krisis berlangsung, ketika pertumbuhan ekonomi masih sekitar 7 %, angka pengangguran terbuka total telah mencapai angka 7 % sedang angka pengangguran terbuka tenaga terdidik di perkotaan sudah mencapai angka 18,6 %. (Manning, 1997). Angka pengangguran terbuka semakin meningkat tajam dan melanda hampir seluruh lapisan masyarakat ketika gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi sebagai akibat perusahaan mengurangi produksi atau gulung tikar karena krisis moneter. Juga ada kebijakan melikuidasi bank bermasalah. Saat ini pengangguran terbuka total diperkirakan mencapai angka 17,1 % atau sekitar 15,4 juta (Johnson, 1997:39). Meskipun sebagian pekerja terkena PHK terpaksa kembali ke daerah asal (pedesaan), barangkali sebagian besar pengangguran terbuka bertahan di pusat-pusat industri (seperti Jabotabek) atau dengan segala daya untuk tetap mengadu nasib di perkotaan.

Pekerja yang terpaksa kembali ke desa tidak mustahil menambah angka setengah pengangguran karena kemungkinan mendapatkan pekerja penuh (*full time*) cukup sulit di pedesaan. Angka setengah pengangguran sebelum krisis sekitar 35% dan proporsi terbesar berada di pedesaan (Johnson, 1997:35). Setelah krisis ekonomi, angka setengah pengangguran diperkirakan mencapai 40 – 50 juta atau sekitar 50%. Masalah ketenagakerjaan ini semakin runyam karena selama

krisis ribuan pekerja migran yang selama ini bekerja di Malaysia dan Singapura dipulangkan ke daerah asal.

Peluang kerja sektor informal semakin tidak lagi mudah dimasuki. Persaingan semakin ketat karena pekerja kelas menengah dan para selebritis selama krisis ekonomi berusaha mengkais rezeki di sektor ini¹. Pekerja sektor formal yang terkena PHK atau mendapat kesulitan berusaha di sektor formal juga berusaha masuk ke sektor informal. Seperti di Jakarta dan di beberapa kota besar banyak kalangan kelas menengah, termasuk selebritis, berusaha memasuki sektor informal selama krisis. Oleh karena itu, proporsi pekerja memasuki sektor informal menaik dari sekitar 65% pada tahun 1997 (mulai krisis) dan menjadi sekitar 68% pada tahun 1998 (selama krisis berlangsung) (lihat Tabel 5).

TABEL 5

Pekerja Menurut Status Pekerjaan Tahun 1997 dan 1998

Status Pekerjaan	1997 (%)	1998 (%)
Formal	35,4	31,7
Informal	64,6	68,3
Total %	100	100
N (Juta)	82,5	87,0

Sumber: Susenas 1997 dan 1998

Memasuki sektor informal merupakan alternatif peluang kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Selama ini tidak mudah bagi angkatan kerja kita untuk memasuki sektor formal apalagi yang menuntut keterampilan tinggi. Sebelum krisis terjadi, peluang kerja formal, terutama yang menuntut keterampilan tinggi sulit untuk dimasuki para pekerja karena kalah bersaing dengan pekerja asing, seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu. Sebagai gambaran sebelum krisis berlangsung banyak pekerja asing telah memasuki peluang kerja, seperti manager, profesional, foreman, operator dan

¹ Proses informalisasi pasar kerja telah mengancam kelangsungan sumber penghasilan para pedagang kali lima (*Kompas*, 1998, Senin 24 Agustus).

tehnisi (lihat Tabel 2). Selama krisis berlangsung kemungkinan sebagian besar pekerja asing telah meninggalkan Indonesia, tetapi tidak tertutup kemungkinan mereka akan kembali lagi memasuki Indonesia ketika ekonomi kita pulih dan ketika perdagangan bebas diterapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan di pasar kerja akan semakin ketat.

Persaingan yang cukup ketat di pasar kerja menyebabkan angkatan kerja sulit mendapatkan kerja. Pengangguran terbuka, setengah pengangguran dan masuknya angkatan kerja ke sektor informal diikuti dengan munculnya gejala ketidakpastian penghasilan. Akibat langsung dari keadaan itu adalah menurunnya daya beli masyarakat. Tidak dapat dielakkan kemampuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terutama pemenuhan gizi keluarga, tentu semakin menurun apalagi harga sembako mengalami kenaikan. Salah satu dampak yang sudah muncul ke permukaan adalah meningkatnya anak balita kekurangan gizi. Diperkirakan jumlah anak penderita kekurangan gizi mencapai angka 50% dari 23 juta jumlah anak balita. Kenaikan harga obat dan biaya pengobatan turut memperburuk keadaan kesehatan masyarakat. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan menaik tajam.

Selama krisis, jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat dari sekitar 12 juta di awal tahun 1997 menjadi sekitar 80 juta di pertengahan 1998. Angka kemiskinan di pedesaan saat ini telah mencapai 53% dan di perkotaan sekitar 39% (ILO, 1998: 99). Bahkan ILO memperkirakan 2 dari 3 penduduk Indonesia tergolong miskin. Angka kemiskinan itu masih bisa diperdebatkan karena masing-masing formula akan menghasilkan angka yang berbeda. Tanpa menggunakan formula, secara realitas kita dapat menyaksikan bahwa kemiskinan belakangan meningkat tajam karena kerusuhan dan konflik sosial yang terjadi di beberapa tempat tidak hanya memaksa penduduk harus mengungsi dan tinggal di tenda-tenda atau tempat pengungsian tetapi jutaan penduduk kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Artinya, selama krisis ekonomi berlangsung yang kemudian diikuti berbagai kerusuhan sosial menyebabkan penduduk yang hidup dalam kemiskinan meningkat tajam. Upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini diterapkan nampaknya tidak memberikan arti terhadap penurunan kemiskinan. Gelombang krisis ekonomi yang berkepanjangan di era globalisasi telah

meluluhlantakkan apa yang telah dilakukan dan dihasilkan dalam penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan

Pengalaman globalisasi abad 19 dan abad ini mengindikasikan bahwa integrasi ekonomi, ekspansi pasar memberikan sedikit peluang untuk penanggulangan kemiskinan. Namun beberapa fakta mengindikasikan bahwa globalisasi mempunyai kecenderungan menyebabkan terjadinya de-industrialisasi dan memicu krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan munculnya gejala pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Memang, masih terbuka peluang kerja di sektor informal tetapi kurang dapat memberikan kepastian penghasilan. Dalam kondisi yang demikian banyak penduduk terdorong ke dalam situasi ketidakpastian penghasilan dan terpuruk ke dalam kemiskinan. Ini mengisyaratkan bahwa sampai saat ini globalisasi cenderung menghambat daripada menciptakan peluang penanggulangan kemiskinan.

Apa yang dapat kita lakukan agar implikasi globalisasi dapat diminimalisasi? Artinya, tidak sampai menyebabkan kemiskinan menjadi bertambah. Barangkali, perlu dipikirkan suatu gerakan untuk memunculkan kesadaran kritis masyarakat bahwa globalisasi dapat berimplikasi negatif bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, globalisasi termasuk ekspansi pasar perlu diimbangi dengan liberalisasi politik sehingga masyarakat mampu dan berkehendak secara sadar untuk memperjuangkan hak-hak dan menolak segala sesuatu yang dianggap merugikan mereka. Jebakan ekspansi pasar perlu dilawan dengan menyadarkan masyarakat melalui upaya pembatasan perilaku konsumtif. Peranan lembaga konsumen yang independen perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberi informasi secara benar tentang berbagai produk yang ada di pasar. Akhirnya, masyarakat perlu secara sadar dan jujur untuk melakukan penilaian tentang manfaat liberalisasi pasar (globalisasi). Kalau merugikan dan menghambat penanggulangan kemiskinan, masyarakat harus menolak secara tegas seperti yang dilakukan oleh kalangan LSM di Filipina dan gerakan *jubilee* di Eropa.***

Daftar Pustaka

- Boediono, Ace Suryadi, dan Rusman Heriawan, (1999). *Keadaan dan Perkembangan Pendidikan Setahun Setelah Krisis*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Informatika (makalah tidak diterbitkan).
- Booth, Anne, (1998). 'Perdagangan, Pertumbuhan dan Perkembangan Perekonomian Kolonial.' Dalam Anne Booth, J.O William Malley, Anna Weideman (ed), *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hal. 363-398.
- Chalmers, Ian, (1996). *Konglomerasi: Negara dan Modal dalam Industri Otomotif Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Furnival, J.S, (1944). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge Unibersity Press.
- Giddens, Anthony, (2000). *Jalan Ketiga: Pembaharuan Demokrasi Sosial (terjemahan)*. Jakarta: Gramedia.
- Hall, D.G.E, (1988). *Sejarah Asia Tenggara (terjemahan)*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- ILO, (1998). *Employment Challenges of The Indonesian Economic Crisis*. Jakarta: INDP.
- Johnson, Colin, (1997). 'The Indonesian Economy: Survey Recent Development.' *BIES*, 33 (2).
- Khor, Martin, (2000). *Globalization and the South: Some Critical Issues*, Penang Malaysia: Third World Network.
- Kuncoro, Mundrajad dan Abimayu, Anggito, (1995). 'Struktur dan Kinerja Industri dalam Era Deregulasi dan Globalisasi.' *Kelola*, Vol 10 No 4.

- Mansvelt, W.M.F, (1979). 'Changing Economy of Indonesia: A Selection of Statistical Source Material From Early 19th Century up to 1940.' *National Income*, 5, The Hague Martinus Nijhoff.
- Manning, Chris, (1998). *Indonesian Labour in Transition: An East Asian Succes Story*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Raharjo, Dawam, (1986). *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Penerbit UI.
- World Bank, (1995). *Workers in an Integrating World*. New York: Oxford University Press.